**PERJANJIAN KERJA SAMA**
**ANTARA**
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**
**UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**
**DENGAN**
**SEKOLAH PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
**TENTANG**
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 2163/VII.B10/FIP/UK-ML/VIII.2027
NOMOR: 20.8.1/UN32.13/KS/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cicilia Ika Rahayu Nita, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, berkedudukan di Jl. S. Supriyadi No. 48 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Syamsul Bachri, S.Si, M. Sc., Ph.D, Direktur Sekolah Pascasarjana,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Perkumpulan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 106/D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001 dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. UM memiliki sejarah panjang dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan menyelenggarakan berbagai program pendidikan pada jenjang sarjana, magister, dan doktor. Sebagai perguruan tinggi yang

berorientasi pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, UM terus mengembangkan inovasi, kualitas akademik, serta kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia.

c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Tata Kelola (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## PASAL 1
## KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dalam rangka pengembangan kelembagaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA **PIHAK**.

(3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi secara terperinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan.

## PASAL 2
## RUANG LINGKUP

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi yang disepakati bersama. Pelaksanaan kerja sama tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan seminar, pelatihan, pendampingan, penelitian bersama, publikasi ilmiah, pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi praktik lapangan/magang mahasiswa, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, keahlian,

serta sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pihak guna mendukung terselenggaranya kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi secara efektif, berdaya guna, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**
**TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk :

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola.
(2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang setara dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

**PASAL 4**
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati; dan
   b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas, data, informasi, dan dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
   a. Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
   b. Memberikan informasi, data, dan/atau materi yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
   c. Menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. Mengusulkan kepada PIHAK KESATU untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati; dan



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas, data, informasi, dan dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
b. Memberikan informasi, data, dan/atau materi yang diperlukan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

## PASAL 5
## JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **Lima (5)** tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

## PASAL 6
## BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama.

## PASAL 7
## PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.

(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi kepada PIHAK KEDUA.

(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan program dan kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada PIHAK KESATU.

(4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada PIHAK KESATU;



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

## PASAL 9
## KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**
**UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**

| | |
|---|---|
| Nama | : Dr. Cicilia Ika Rahayu Nita, M.Pd., |
| Jabatan | : Dekan |
| Alamat | : Jl. S. Supriyadi No. 48 Malang |
| Telepon | : (0341) 801488 |
| Email | : fip@unikama.ac.id |

(2) **PIHAK KEDUA**
**SEKOLAH PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

| | |
|---|---|
| Nama | : Prof. Syamsul Bachri, S.Si, M. Sc., Ph.D |
| Jabatan | : Direktur |
| Alamat | : Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 |
| Telepon | : 0821-4276-2972 |
| Email | : pascasarjana@um.ac.id |

## PASAL 10
## *FORCE MAJEURE*

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**
**PERSELISIHAN**

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12**
**KETENTUAN PENUTUP**

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

| **PIHAK KESATU** | **PIHAK KEDUA** |
|---|---|
| DEKAN | DIREKTUR |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | SEKOLAH PASCASARJANA |
| UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
| **Dr. Cicilia Ika Rahayu Nita, M.Pd.** | **Prof. Syamsul Bachri, S.Si, M. Sc., Ph.D** |



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua